



ANALISIS SE 2016 HASIL LISTING KABUPATEN TRENGGALEK





ANALISIS SE 2016 HASIL LISTING KABUPATEN TRENGGALEK



ANALISIS SE2016
HASIL LISTING
KABUPATEN TRENGGALEK

Katalog BPS : 9102059.3503
Nomor Publikasi : 35035.1704
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : iv + 68
Naskah : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Trenggalek

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah *listing* atau pendaftaran usaha/perusahaan (SE2016-L). Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai unit usaha/perusahaan beserta karakteristik usahanya. Hasil SE2016-L dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang potensial baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun penyediaan lapangan usaha.

Publikasi Analisis SE2016 Hasil Listing ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi kewilayahan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan SE2016-L. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Trenggalek, November 2017
Kepala BPS Kabupaten Trenggalek


Agung Rahardjo

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Catatan Teknis	1
Bab I Potensi Ekonomi Trenggalek	13
A Sumber Daya Manusia yang Melimpah	13
B Perekonomian Trenggalek Stabil dalam 5 Tahun Terakhir	18
C Penggerak Utama Perekonomian Trenggalek	20
Bab II Tantangan Pembangunan Ekonomi	23
A Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah	23
B Ketidakmerataan Infrastruktur Salah Satu Penyebab Disparitas Ekonomi Wilayah	25
Bab III Pengembangan Potensi Ekonomi	29
A Optimalisasi Sektor Potensial	29
B Potensi Ekonomi Trenggalek	31
C Potensi Wilayah dalam Visi dan Misi Pemerintah Trenggalek	48
Bab IV Jasa Pendidikan Sebagai Sektor Unggulan	53
A Potensi Jasa Pendidikan	53
B Tantangan Jasa Pendidikan	57
C Program Pendidikan Pemerintah Daerah	61

Metodologi Analisis

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen.

1. *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Disamping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah.

Rumus untuk mendapatkan sektor unggulan di suatu wilayah analisis adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Keterangan:

S_{ij} : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis j

S_j : PDRB pada wilayah analisis j

S_{in} : PDB pada sektor i di wilayah referensi

S_n : PDB di wilayah referensi

Jika berpijak pada data SE2016-L yang menghasilkan indikator jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja, maka PDRB pada rumus di atas dapat menggunakan jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Pengukuran LQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $LQ > 1$, sektor i di wilayah analisis j merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah analisis tersebut daripada tingkat tingkat wilayah yang lebih luas lagi (wilayah referensi)
- b. Jika $LQ = 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi.
- c. Jika $LQ < 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah referensi.

2. Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Caranya dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor di suatu wilayah dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan data yang terbatas (Firdaus, 2007). Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Dalam metode ini terdapat 3 bagian yaitu:

- a. **Regional Share (RS)** merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan yang berlaku.
- b. **Proporsional Shift (PS)** komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- c. **Differential Shift (DS)** merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah
- d. **Shift Share(SS)** merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Share* dan *Differential Share*

Jika ingin melihat keunggulan wilayah di suatu wilayah, maka keempat unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$RS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right)$$

$$PS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{ijt}}{y_{ij0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$DS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{ijt}}{y_{ij0}} - \frac{y_{it}}{y_{i0}} \right)$$

$$SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Keterangan:

Y_t = PDB wilayah referensi periode akhir tahun.

Y_0 = PDB wilayah referensi periode awal tahun.

y_{it} = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun akhir.

y_{i0} = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun awal.

y_{ijt} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun akhir.

y_{ij0} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun awal.

Interpretasi dari hasil pengukuran diatas sebagai berikut:

- Jika $PS_{ij} > 0$, artinya bahwa sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $DS_{ij} > 0$, artinya bahwa daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $SS_{ij} > 0$, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Dari ukuran diatas, maka sektor unggulan wilayah adalah sektor-sektor yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing suatu sektor menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Metode MRP melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). MRP membandingkan pertumbuhan suatu sektor pada

suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung yaitu: rasio pertumbuhan wilayah study (RPs), dan rasio wilayah referensi (RPr). Jika ingin melihat sektor unggulan suatu pulau, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0})/y_{ipt}}{(y_{pt} - y_{p0})/y_{p0}}$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{in0})/y_{int}}{(y_{nt} - y_{n0})/y_{n0}}$$

Keterangan:

- y_{ipt} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.
- y_{ip0} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.
- y_{pt} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.
- y_{p0} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.
- y_{int} = PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.
- y_{in0} = PDR sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.
- y_{nt} = PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir.
- y_{n0} = PDB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor, tanpa melihat kontribusi suatu sektor di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi → sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)

- Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi
- Jika nilai RP_{ip} negatif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi
- Jika nilai RP_{ip} negatif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah → sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)

4. **Tipologi Klassen**

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor di suatu wilayah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas dan membandingkan pangsa sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih luas. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah.

Untuk melihat potensi ekonomi di suatu wilayah digunakan pendekatan pertumbuhan sektoral dan kontribusinya terhadap perekonomian di suatu wilayah. Melalui metode ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor unggulan dan tumbuh pesat,

sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan, sektor potensial yang berkembang cepat, dan sektor yang tidak potensial. Adapun matriks untuk menentukan tipe karakteristik untuk melihat sektor unggulan di tingkat wilayah analisis adalah sebagai berikut:

Kontribusi Sektor	Pertumbuhan Sektor	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

Keterangan:

- G_i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis
- G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
- S_i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis
- S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi

PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN WILAYAH

Untuk menentukan sektor/kategori yang merupakan unggulan wilayah, menggunakan empat metode, yaitu:

- o LQ (Sumber: Jumlah usaha dan tenaga kerja dari SE2016-L)
- o *Shift Share* (Sumber: PDRB Harga Konstan tahun 2010 dan 2016 menurut kategori).
- o Model Rasio Pertumbuhan (Sumber: PDRB Harga Konstan tahun 2010 dan 2016 menurut kategori).

- Tipologi Klassen (Sumber: PDRB Harga Konstan tahun 2010 dan 2016 menurut kategori).

Selanjutnya, dilakukan skoring masing-masing hasil olahan data keempat metode (LQ, *Shift-share*, Model Rasio Pertumbuhan dan Tipologi Klassen).

- Pada metode LQ, suatu kategori diberi skor bernilai 1 jika mempunyai nilai $LQ > 1$, dan diberi nilai 0 jika nilai $LQ < 1$.
- Dalam metode *Shift-share*, suatu kategori diberi skor bernilai 1 jika nilai $PS_{ij} > 0$ dan $DS_{ij} > 0$, dan diberi nilai 0 untuk kondisi lainnya.
- Dalam metode Model Rasio Pertumbuhan (MRP), suatu kategori diberi skor bernilai 1 jika RP_{ip} dan RP_{in} dua-duanya bernilai positif, dan diberi nilai 0 untuk kondisi lainnya.
- Dalam metode topologi Klassen, suatu kategori diberi skor bernilai 1 jika $G_i \geq G$ dan $S_i \geq S$, dan dan diberi nilai 0 untuk kondisi lainnya.

Hasil skoring kemudian dimatrickan dan kategori yang mempunyai skor tertinggi disepakati sebagai kategori unggulan di suatu wilayah.

Contoh ilustrasi hasil pengukuran dari empat metode tadi disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel A. Matriks Hasil Pengukuran Kategori Unggulan

Kategori	LQ Jumlah Usaha (UMK)	LQ Jumlah Usaha (UMB)	LQ Jumlah Usaha (UMB & UMK)	LQ Tenaga Kerja (UMB & UMK)	MRP	Klas sen	Shift Share	Jumlah kol (2) s/d (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. Pertambangan dan penggalian	1	1	1	1	0	1	0	5
C. Industri Pengolahan	0	0	0	0	0	1	1	2
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	1	1	1	1	0	0	1	5
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	1	0	1	0	1	1	4
F. Konstruksi	1	1	1	0	1	0	1	5
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	1	1	1	1	1	0	0	5
H. Pengangkutan dan pergudangan	0	0	0	0	1	0	0	1
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1	0	1	1	1	1	1	6
J. Informasi Dan Komunikasi	1	1	1	1	1	0	0	5
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	1	0	1	1	0	1	4
L. Real Estat	1	0	1	0	1	1	1	5
M,N. Jasa Perusahaan	1	0	1	0	1	0	0	3
P. Pendidikan	1	1	1	1	1	0	0	5
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1	1	1	1	1	0	0	5
R,S,U Jasa lainnya	0	0	0	0	1			1

Keterangan:

- *skoring dengan nilai 1 jika memenuhi syarat dan 0 tidak memenuhi sarat*

Mengacu pada Tabel A di atas, kategori unggulan untuk wilayah tersebut (jumlah kriteria yang memenuhi > 3):adalah:

- Pertambangan dan Penggalian (B)
- Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin (D)
- Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi (E)
- Konstruksi (F)
- Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G)
- Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I)
- Informasi Dan Komunikasi (J)
- Aktivitas Keuangan Dan Asuransi (K)
- Pendidikan (P)
- Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial (Q)

Selanjutnya, dilakukan sinergitas hasil pengolahan *economic base approach* tadi dengan Rencana Stategis Pembangunan Daerah (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh kategori unggulan yang akan dianalisis lebih lanjut. Untuk memahami konsep sinergitas tersebut bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel B. Matriks Sinergitas Data Hasil Listing SE2016 dengan Data Perencanaan Daerah

Sinergitas data SE2016-L dan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Kategori Unggulan Menurut SE2016 dan PDRB	
		Ya	Tidak
Sektor Unggulan Menurut Dokumen Perencanaan Pembangunan	Ya	Sektor Unggulan	Sektor Potensial
	Tidak	Sektor Potensial	Bukan Sektor Unggulan

Jika suatu kategori menurut hasil *economic base approach* adalah unggulan dan kategori tersebut terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah (diulas sebagai sektor unggulan), maka bisa dikatakan kategori tersebut adalah **sektor unggulan**.

Jika hanya salah satu saja yang menyimpulkan suatu kategori itu unggulan, maka kategori tersebut bisa dikatakan sebagai **sektor potensial**. Pada kondisi terakhir, baik hasil olah *economic base approach* dan dokumen perencanaan pembangunan daerah suatu kategori tidak digolongkan sebagai sektor unggulan, maka kategori itu jelas-jelas merupakan **sektor non unggulan** di wilayah bersangkutan.

PENENTUAN WILAYAH ANALISIS

Untuk tujuan analisis hasil listing SE2016, wilayah analisis Trenggalek dibagi menurut wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

<https://trenggalekkab.bps.go.id>

<http://trenggalekkab.bps.go.id>

Potensi Ekonomi Trenggalek

A. Sumber Daya Manusia yang Melimpah

Tenaga Kerja Trenggalek secara Kuantitas

Potensi kekuatan ekonomi Trenggalek tidak hanya dari sumber daya alam, namun juga dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk sebesar 691.295 jiwa (2016) dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,71 maka Trenggalek tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Trenggalek yang cukup besar tersebut akan semakin bermakna jika dibarengi dengan peningkatan daya saing. Fokus yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, karena akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing.

Selama lima tahun terakhir jumlah angkatan kerja Trenggalek berfluktuasi. Pada periode 2011-2015, jumlah angkatan kerja naik dari 410.215 orang pada tahun 2011 menjadi 414.400 orang atau naik 1,02 persen, dan selanjutnya turun menjadi 404.547 orang pada tahun 2015 atau turun 2,37 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja pada periode tersebut, tercatat tertinggi pada tahun 2012 sebesar 399.772 orang, dan selanjutnya berfluktuasi hingga tercatat pada tahun 2015 sebesar 394.587 orang. Selama periode 2011-2015, jumlah penduduk bekerja terendah tercatat pada tahun 2014 sebesar 382.330 orang.

Tabel 1.1
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek, 2011-2015

Indikator Ketenagakerjaan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	531.151	533.209	534.989	539.318	543.532
- Angkatan Kerja	410.215	412.033	414.400	399.084	404.547
a. Bekerja	396.804	399.772	397.688	382.330	394.587
b. Pengangguran Terbuka	13.411	12.261	16.732	16.754	9.960
- Bukan Angkatan Kerja	120.936	121.176	120.589	140.234	138.985
TKK (%)	96,73	97,02	95,96	95,80	97,54
TPT (%)	3,27	2,98	4,04	4,20	2,46
TPAK (%)	77,23	77,27	77,46	74,00	74,43

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (Hasil Sakernas 2011-2015)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Trenggalek dari tahun 2011 hingga 2015 di atas 95,5 persen. Angka itu menunjukkan bahwa dari total jumlah angkatan kerja, sekitar 95,5 persen adalah orang yang bekerja, sedangkan sisanya adalah penganggur. Jumlah penganggur di bawah 4,5 persen selama empat tahun terakhir, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah Trenggalek dalam menjaga membengkaknya angka pengangguran. Daya serap tenaga kerja di Trenggalek cukup baik, meski jumlah penduduk Trenggalek terus bertambah.

Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama

Tenaga kerja Trenggalek mayoritas berpendidikan SMP ke bawah. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus. Namun, di sisi lain tidak tertampungnya pekerja profesional akan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal.

Kegiatan informal mempunyai karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula (Bappenas, 2009). Keberadaan dan kelangsungan kegiatan informal di dalam perekonomian Trenggalek merupakan realitas yang juga berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Kegiatan informal mampu menampung tenaga kerja dengan keahlian yang kurang. Sebagai dampak positif kegiatan informal adalah berkurangnya pengangguran.

Untuk analisis hasil listing SE2016, analisis Trenggalek akan dibahas menurut usaha/perusahaan dan tenaga kerja, skala usaha, lapangan usaha/kategori dan perbandingan antar wilayah se eks Karesidenan Kediri yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten dan Kota Blitar. Analisis ini diharapkan dapat memberikan ilustrasi mengenai perekonomian di Trenggalek menurut hasil SE2016, kecuali kategori pertanian yang tidak termasuk dalam cakupan SE2016.

Kegiatan informal biasanya usaha yang berskala mikro atau kecil yang biasa disebut Usaha Mikro Kecil (UMK). Usaha berskala UMK

memang menjadi andalan penduduk Trenggalek. Berdasarkan hasil SE2016, jumlah tenaga kerja UMK non pertanian tercatat sebanyak 170.943 orang (93,60 persen). Dominasi jumlah usaha dengan skala UMK, menunjukkan UMK merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Trenggalek.

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha/Perusahaan di Kabupaten Trenggalek,
Hasil SE2016-L

Kecamatan	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
[010] Panggul	14.537	209	14.746
[020] Munjungan	8.973	85	9.058
[030] Watulimo	22.118	2.236	24.354
[040] Kampak	12.506	369	12.875
[050] Dongko	8.554	67	8.621
[060] Pule	7.821	47	7.868
[070] Karangany	11.972	950	12.922
[071] Suruh	4.671	26	4.697
[080] Gandusari	14.934	1.700	16.634
[090] Durenan	16.707	997	17.704
[100] Pogalan	11.410	738	12.148
[110] Trenggalek	21.386	3.618	25.004
[120] Tugu	12.137	572	12.709
[130] Bendungan	3.217	65	3.282
Kab. Trenggalek	170.943	11.679	182.622

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (Hasil SE2016-L)

UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Trenggalek tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala

usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa.

Jumlah UMK di Trenggalek hasil SE2016-L adalah 95.246 atau sebesar 99,46 persen dari keseluruhan usaha/perusahaan yang mencapai 95.766 buah. UMK terbanyak terdapat di Kecamatan Watulimo sebesar 12.428 buah atau 13,05 persen dari seluruh UMK di Trenggalek, diikuti Kecamatan Trenggalek sebanyak 9.902 buah (10,40 persen) dan Kecamatan Durenan dengan 9.492 buah (9,97 persen). Sedangkan jumlah UMK terkecil berada dikecamatan Bendungan dengan 2.146 usaha/perusahaan. Jumlah ini sekitar 2,25 persen dari total UMK dan sebesar 2,24 persen dari keseluruhan usaha/perusahaan.

Sementara, jumlah UMB di Trenggalek tercatat 520 usaha atau 0,54 persen dari total usaha. Kecamatan Trenggalek merupakan kecamatan dengan jumlah UMB terbanyak yaitu 151 usaha atau sekitar 29,04 persen dari keseluruhan UMB di Kabupaten Trenggalek dan sekitar 0,16 persen dari keseluruhan usaha di Kabupaten Trenggalek. Berikutnya adalah Kecamatan Watulimo dengan 100 usaha (19,23 persen dari total UMB) dan Kecamatan Durenan dengan 56 usaha (10,77 persen dari total UMB).

UMB terendah tercatat di Kecamatan Suruh sebanyak 26 usaha atau 0,58 persen dari total UMB di Trenggalek. Berikutnya adalah Kecamatan Bendungan dengan 5 usaha (0,96 persen dari total UMB) dan Kecamatan Dongko dengan 8 usaha (1,54 persen dari total UMB). Selain karena hanya wilayahnya perbukitan dan pegunungan, ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah agraris sehingga jumlah usaha berskala UMB tidak sebanyak kecamatan lainnya. Sebaran UMB masih

terfokus pada wilayah kecamatan yang infrastrukturnya cukup mendukung di wilayah yang bersangkutan.

Salah satu upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut adalah dengan memperkuat dengan mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing kecamatan agar kualitas daya saing terjaga. Oleh sebab itu pembangunan berbasis sumber daya ekonomi lokal menjadi salah satu fokus pemerintah daerah saat ini. Selain untuk pemerataan ekonomi, tetapi juga ditujukan untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia.

B. Perekonomian Trenggalek Stabil dalam 5 Tahun Terakhir

Krisis global yang terjadi setelah periode 1997-1998 memengaruhi perekonomian dunia, tidak terkecuali Jawa Timur. Secara langsung berdampak pula pada Trenggalek meskipun mempunyai kontribusi kurang besar terhadap perekonomian Jawa Timur. Banyak kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengalami kontraksi pertumbuhan termasuk Trenggalek pada masa itu.

Krisis ekonomi juga terjadi tahun 2008 yang berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat yang dikenal sebagai istilah *subprime mortgage*. Kemudian dilanjutkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2011 di kawasan Eropa (*Eurozone Sovereign debt crisis*). Belajar dari krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998, dampak krisis tahun 2008 dan 2011 bisa dieliminir. Faktor fundamental ekonomi yang terus diperkuat, mampu menghadapi krisis sehingga tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam periode lima tahun terakhir, perekonomian Trenggalek masih tumbuh minimal 5 persen, meski mengalami perlambatan sampai

tahun 2016. Perekonomian Trenggalek yang cukup stabil ini turut memberikan kontribusi bagi kestabilan perekonomian Jawa Timur.

Banyaknya UMK yang begitu dominan di Trenggalek, memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan perekonomian Trenggalek. Umumnya, UMK di Trenggalek berbahan baku lokal dengan didukung pembiayaan mandiri, sehingga cukup kuat menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan faktor eksternal. Selain itu, sifatnya yang padat karya, UMK di Trenggalek mampu menyerap banyak tenaga kerja. Di kala UMB terkena dampak krisis berupa perampangan karyawan, UMK tetap mampu menyerap tenaga kerja.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten/Kota
se eks Karesidenan Kediri, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02
Jawa Timur	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55
Kabupaten/Kota					
a. Kab. Trenggalek	6,21	6,00	5,28	5,03	5,00
b. Kab. Tulungagung	6,47	6,13	5,46	4,99	4,99
c. Kab. Kediri	5,62	5,06	5,02	5,05	5,09
d. Kab. Blitar	6,11	5,82	5,32	4,88	5,02
e. Kab. Nganjuk	5,85	5,40	5,10	5,18	5,29
f. Kota Kediri	5,27	3,52	5,85	5,36	5,50
g. Kota Blitar	6,52	6,50	5,88	5,68	5,76

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan: * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara

Selama kurun waktu 2012-2016, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Fundamental ekonomi harus lebih diperkuat agar faktor eksternal tidak menjadi kendala di kemudian hari. Terbukti, meski pertumbuhan

ekonomi relatif stabil terhadap kondisi pelemahan global di beberapa tahun terakhir, tetapi secara tidak langsung laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur ikut mengalami perlambatan walaupun tidak begitu signifikan. Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kondisi ekonomi wilayah akan mandiri tidak terpengaruh faktor eksternal lainnya.

C. Penggerak Utama Perekonomian Trenggalek

Dari hasil SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Trenggalek tercatat sebanyak 95.766 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat 2,16 persen dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 93.738 usaha/perusahaan. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Trenggalek beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian masyarakat juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan informasi-komunikasi adalah kategori usaha yang belakangan ini menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Trenggalek. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori tersebut cukup tinggi dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi total yang mencapai lebih dari persen pada periode 2010-2016. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup menggembirakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 1.4
 Pertumbuhan PDRB Beberapa Kategori Lapangan Usaha
 Kabupaten Trenggalek, 2012-2016

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,37	6,44	2,57	4,92	5,11
Konstruksi	7,02	8,64	6,49	2,88	5,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,33	5,99	4,08	5,32	5,91
Transportasi dan Pergudangan	8,69	9,64	9,47	6,84	6,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,71	7,42	7,46	7,32	7,40
Informasi dan Komunikasi	14,52	13,86	8,15	7,31	7,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,05	11,45	5,38	5,32	7,24
Real Estate	8,71	7,42	7,02	5,61	5,53
Jasa Perusahaan	6,65	5,63	8,02	5,57	5,42
Jasa Pendidikan	8,94	8,95	6,24	6,02	6,02

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan: * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara

Secara kuantitas, dari hasil SE2016 aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil & sepeda motor (kategori G), berjumlah 43,48 persen. Aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga dan menjadi sektor unggulan di Trenggalek selain perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor adalah industri pengolahan (kategori C) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I). Industri pengolahan (kategori C) di Trenggalek tercatat sebanyak 33,57 persen dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori I) sebanyak 8,25 persen.

Konstruksi (kategori F) dan informasi dan komunikasi (kategori J) yang mempunyai pertumbuhan tinggi pada beberapa tahun terakhir,

distribusi jumlah usahanya masing-masing 0,84 persen dan 1,82 persen. Kedua kategori ini kontribusinya tidak terlalu besar meskipun keduanya digabungkan. Sementara itu kontribusi gabungan aktivitas keuangan dan asuransi (kategori K), real estat (kategori L), aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (kategori M), dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjuang (kategori N) adalah sebanyak 1,84 persen.

Kontribusi gabungan kategori pendidikan (kategori P), aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial (kategori Q), kesenian, hiburan dan rekreasi (kategori R), aktivitas jasa lainnya (kategori S) dan kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya (U) sebanyak 6,65 persen. Untuk usaha pertambangan dan penggalian (kategori B), pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (kategori D) dan usaha pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah dan aktivitas remediasi (kategori E) sebanyak 0,98 persen.

Baik jumlah usaha dan tenaga kerja berskala UMB (usaha menengah dan besar), terbanyak terdapat di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Trenggalek. Jumlah UMB di Kecamatan Trenggalek sekitar 151 usaha mampu menyerap 3.618 tenaga kerja. Terbanyak kedua tercatat di Kecamatan Watulimo dengan UMB sebanyak 100 usaha dan mampu menyerap 2.236 tenaga kerja.

Tantangan Pembangunan Ekonomi

A. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah

Kualitas SDM menjadi Tantangan Pembangunan Ekonomi

Smith (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja saling berkaitan dan menguatkan. Namun, untuk menciptakan ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang berkualitas adalah syarat yang harus dipenuhi.

Hasil Sakernas 2015 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja Trenggalek masih rendah karena sebagian besar berpendidikan SLTP kebawah atau sebesar 55,17 persen. Kondisi ini tidak lepas dari budaya di sebagian wilayah Trenggalek yang lebih merasa cukup hanya berpendidikan SD kemudian bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumahtangga. Dampak budaya tersebut, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah relatif rendah.

Dampak lainnya, produktivitas kerja juga rendah karena mempunyai skill yang tidak begitu bagus, dan pada akhirnya daya saing tenaga kerjanya menjadi rendah pula. Ketidaksiapan untuk terjun ke dunia kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah, menyebabkan mereka kalah bersaing dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah, akan menyebabkan tidak tertampungnya mereka pada lapangan pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan keahlian dan kualifikasi tinggi. Jenis usaha yang digeluti, umumnya informal dan jika masuk di lapangan pekerjaan yang bersifat formal biasanya berstatus buruh kasar yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Tentunya, itu akan berdampak terhadap upah gaji mereka yang umumnya relatif rendah dibanding jenis pekerjaan lain yang membutuhkan keahlian khusus.

Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Todaro, 2014). Meskipun tenaga kerja di Trenggalek masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah, namun berdasarkan data Sakernas 2011-2015, tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas relatif meningkat selama rentang tahun tersebut.

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang bisa dicapainya. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan SMA ke atas meningkat dari 15,56 persen pada tahun 2011 menjadi 23,12 persen pada tahun 2015.

Sesungguhnya, pendidikan dapat meningkatkan produktivitas secara tidak langsung. SDM yang berpendidikan menggunakan sumberdaya lain lebih efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula proses produksi menjadi lebih baik.

Kesimpulannya, peningkatan pendidikan akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi. Hal inilah yang membedakan antara daerah kaya dan daerah miskin. Daerah miskin tidak mampu

meningkatkan produktivitas karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru. Disamping itu, hal ini terjadi karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP, 1996).

B. Ketidakmerataan Infrastruktur Salah Satu Penyebab Disparitas Ekonomi Wilayah

Ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan produktivitas dari dua sisi, baik dari input maupun output. Dari sisi output, infrastruktur merupakan hal penting dalam menunjang proses produksi dan distribusi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan output.

Dari sisi input tenaga kerja, infrastruktur transportasi dan komunikasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas tenaga kerja. Sayangnya, keberadaan infrastruktur tersebut di Trenggalek cukup bervariasi antar wilayah.

Ketimpangan wilayah merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Jika ketimpangan wilayah yang terjadi cukup lebar, akan menciptakan kecemburuan sosial. Dalam upaya menciptakan pembangunan yang tidak menimbulkan kecemburuan sosial, disparitas wilayah perlu dievaluasi. Padahal pembangunan yang diharapkan tidak hanya dinikmati oleh wilayah-wilayah tertentu saja, tetapi dampak pembangunan harus dirasakan untuk semua wilayah.

Pada dasarnya, pembangunan yang hakiki itu tidak mengenal dikotomi antara daerah maju dan daerah tertinggal. Meski potensi daerah berbeda-beda tetapi distribusi pendapatan relatif merata, maka itu yang dinamakan pembangunan yang inklusif. Tidak perlu daerah

yang berstruktur ekonomi agraris atau sektor primer harus ikut berubah arah struktur perekonomiannya menjadi sektor sekunder atau tersier. Asal distribusi pendapatan merata, masyarakat akan sejahtera.

Memang kenyataannya untuk sekarang ini, daerah yang perekonomian didominasi sektor sekunder (industri) dan tersier (perdagangan-jasa) relatif lebih maju dibanding berbasis sektor primer.

Oleh karena itu, ketimpangan antar wilayah perlu dijaga agar tetap stabil dan diharapkan semakin menyempit. Roda ekonomi daerah yang maju mampu sebaiknya menjadi pengungkit perekonomian daerah berbasis sektor primer, untuk tumbuh bersama-sama.

Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis. Hasil-hasil produk sektor primer perlu ditingkatkan nilai produktivitasnya dengan berbasis konektivitas usaha hulu-hilir terutama usaha-usaha yang berskala UMK.

Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus mendukung pelaku ekonomi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat (atau yang disebut program pro growth). Dari kegiatan ekonomi itu selanjutnya diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat (pro job). Masyarakat tidak perlu harus pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan.

Tidak kalah pentingnya, upaya pemerataan pembangunan sarana dan prasana di seluruh wilayah akan memperkecil kesenjangan wilayah. Jika pembangunan infrastruktur hanya difokuskan kepada kota-kota besar maka ketimpangan wilayah akan semakin menganga. Selain itu, untuk mengurangi disparitas wilayah, sangat perlu pembangunan sumber daya manusia berupa keterampilan tenaga kerja.

Infrastruktur pendidikan dan pelatihan sangat vital dalam peningkatan produktivitas.

Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan keberadaan sarana pendidikan dan pelatihan adalah jumlah lembaga/jasa pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Saat ini, jumlah usaha jasa pendidikan di Trenggalek hasil SE2016 adalah 1.886 usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 16.208 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Trenggalek.

Tabel 2.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Pendidikan (Kategori P) Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Hasil SE2016-L

Kecamatan	Usaha/ Perusahaan	Tenaga Kerja	Rasio Tenaga Kerja Terhadap Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)
[010] Panggul	155	1.339	8,64
[020] Munjungan	141	1.117	7,92
[030] Watulimo	156	1.332	8,54
[040] Kampak	86	777	9,03
[050] Dongko	128	1.100	8,59
[060] Pule	111	682	6,14
[070] Karanganyar	141	1.106	7,84
[071] Suruh	84	564	6,71
[080] Gandusari	121	1.039	8,59
[090] Durenan	169	1.581	9,36
[100] Pogalan	159	1.552	9,76
[110] Trenggalek	217	2.171	10,00
[120] Tugu	161	1.374	8,53
[130] Bendungan	57	474	8,32
Kab. Trenggalek	1.886	16.208	8,59

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (Hasil SE2016-L)

Jasa Pendidikan di Trenggalek Hasil SE2016 sejumlah 1.886 usaha (sekitar 1,97 persen dari keseluruhan usaha) dan menyerap sekitar 16.208 tenaga kerja (sekitar 8,88 persen dari keseluruhan tenaga kerja) dengan rasio sebesar 8,59. Kecamatan Trenggalek mendominasi jumlah usaha di bidang pendidikan dengan 217 usaha dan menyerap 2.170 tenaga kerja dengan rasio sebesar 10,00; tertinggi diantara kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek . Hal ini sangatlah wajar mengingat Kecamatan Trenggalek merupakan jantung seluruh aktifitas sosial ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

Namun yang menjadi fokus adalah sebaran jumlah usaha dan tenaga kerja jasa pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan di Trenggalek relatif merata, meskipun beberapa kecamatan masih perlu ditingkatkan lagi.

Pengembangan Potensi Ekonomi

A. Optimalisasi Sektor Potensial

Perbedaan potensi antar kecamatan menjadi latar belakang mengapa optimalisasi potensi kecamatan menarik untuk dianalisis. Saat ini faktanya dari hasil SE2016 menunjukkan bahwa Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Trenggalek mendominasi kegiatan ekonomi sektor non pertanian di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah usaha/perusahaan mencapai 12.528 unit usaha dan 10.053 unit usaha. Kombinasi kedua kecamatan tersebut mencapai 23,58 persen dari keseluruhan usaha/perusahaan non pertanian di Kabupaten Trenggalek.

Namun demikian, sesungguhnya setiap kecamatan memiliki potensi ekonomi dari sisi lain. Oleh sebab itu, penggalan potensi ekonomi di setiap kecamatan khususnya di luar Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Watulimo sangat penting untuk dilakukan. Pemerataan pembangunan antar kecamatan merupakan arah kebijakan utama pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, menggali potensi ekonomi masing-masing kecamatan harus dilakukan untuk optimalisasi pembangunan berbasis potensi yang dimiliki. Dengan demikian, harapannya konvergensi ekonomi dapat dicapai terutama dengan mendorong transformasi dan akselerasi terutama kecamatan

yang berkontribusi kecil khususnya kecamatan yang mempunyai usaha/perusahaan yang tidak begitu banyak.

Tabel 3.1
Capaian Ekonomi Kabupaten Trenggalek,
2012-2016

Tahun	PDRB adhb (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB per kapita (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	9.969.195,2	6,21	14,62
2013	11.007.902,7	6,00	16,10
2014	12.297.003,1	5,28	17,91
2015	13.634.752,8	5,03	19,78
2016	14.915.998,5	5,03	21,58

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Dari data capaian ekonomi Kabupaten Trenggalek, besaran PDRB atas dasar harga berlaku mengalami perkembangan yang cukup pesat pada periode 2012-2016 dari sekitar Rp. 9,96 milyar pada tahun 2012 menjadi sekitar Rp. 14,96 milyar pada tahun 2016. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5,51 persen pertahunnya meskipun mengalami sedikit perlambatan pada setiap tahunnya.

Untuk keperluan perencanaan pembangunan berbasis wilayah kecamatan dengan optimalisasi sektor unggulan, dibutuhkan data yang akan menjadi acuan bagi penentuan program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) adalah Pendaftaran Rumahtangga SE2016 (SE2016-L). Hasil SE2016-L merupakan data dasar yang akan memberikan gambaran yang jelas

tentang struktur dan potensi kegiatan usaha di seluruh kecamatan tidak terkecuali Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Watulimo.

Dengan menganalisa data SE2016, diharapkan kesimpulan yang diperoleh dapat membantu upaya menggali potensi ekonomi kecamatan. Dengan mengetahui potensi ekonomi suatu kecamatan, sehingga kebijakan dibidang perekonomian diharapkan akan terfokus dan terarah. Pemerintah daerah akan mudah menyusun strategi dalam menggali potensi ekonomi wilayahnya.

B. Potensi Ekonomi Trenggalek

Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan akumulasi dari hasil pembangunan ekonomi subnasional. Oleh sebab itu, capaian pembangunan di suatu wilayah akan memengaruhi capaian pembangunan nasional. Hal yang identik terjadi pada sebuah wilayah kabupaten. Pembangunan ekonomi di sebuah kabupaten merupakan akumulasi dari hasil pembangunan ekonomi pada semua kecamatan di wilayah kabupaten tersebut. Dengan demikian informasi mengenai potret kegiatan ekonomi di wilayah kecamatan menjadi sangat penting.

Potensi sumber daya sebagai potret potensi ekonomi di suatu wilayah harus berdasarkan pada data yang tepat dan akurat. Data hasil SE2016 mampu menakar potensi ekonomi tersebut sampai pada level kecamatan. Data SE2016 menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan tenaga kerja seluruh sektor di luar pertanian hingga level administrasi terkecil. Oleh sebab itu, informasi ini sangat penting dalam mengukur potensi dari nilai ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan data yang lengkap jika ditunjang oleh metodologi yang tepat akan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah terdapat tiga metode yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.
2. *Input – Output Approach*: yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.
3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan

Mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah berdasarkan data SE2016 dapat menggunakan pendekatan teori *Economic Base Approach*. Teori ini didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar wilayah terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Dari metode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor unggulan, sektor potensial dan bukan sektor unggulan.

Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities/sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak

memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain Location Quotient (LQ), Analisis Shift-Share, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut dapat dilihat di catatan teknis.

Potensi Wilayah Menurut LQ

LQ digunakan untuk melihat sektor basis maupun non basis. Jika suatu sektor mempunyai angka $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sebaliknya suatu sektor mempunyai angka $LQ < 1$ maka sektor tersebut sektor non basis. Suatu sektor dikatakan sektor basis mengindikasikan sektor tersebut merupakan sektor unggulan/potensial, yang berpotensi ekspor. Sebaliknya sektor non basis merupakan sektor bukan unggulan dan tidak berpotensi ekspor.

Hasil pengolahan LQ terhadap jumlah usaha menurut skala usaha (UMK-UMB) diperoleh informasi bahwa 13 kecamatan mempunyai sektor basis skala UMK dan sebanyak 4 kecamatan mempunyai sektor basis pada usaha berskala UMB. Empat Kecamatan yang mempunyai potensi UMB adalah kecamatan Watulimo, Durenan, Pogalan dan Kecamatan Trenggalek. Seluruh kecamatan yang berpotensi UMB utamanya didukung dari usaha non pertanian yang berasal dari sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Tabel 3.2
Potensi UMK dan UMB Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek,

Kecamatan	LQ Jumlah Usaha		LQ Jumlah Tenaga Kerja	
	UMK	UMB	UMK	UMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[010] Panggal	√		√	
[020] Munjungan	√		√	
[030] Watulimo	√	√		√
[040] Kampak	√		√	
[050] Dongko	√		√	
[060] Pule	√			
[070] Karang	√			√
[071] Suruh	√		√	
[080] Gandusari	√			√
[090] Durenan	√	√	√	
[100] Pogalan	√	√	√	
[110] Trenggalek		√		√
[120] Tugu			√	
[130] Bendungan	√		√	

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = LQ > 1

Kecamatan yang berpotensi pada usaha UMK sebagian besar bergantung pada perekonomian agraris atau pertanian. Namun jumlah usaha berskala UMK non pertaniannya cukup banyak dan berkembang di wilayah itu. UMK lebih menonjol, menunjukkan adanya kemandirian ekonomi yang cukup baik. Kepemilikan UMK umumnya adalah milik masyarakat setempat karena kepedalannya dari modal sendiri. Berbeda dengan UMB, tidak seluruhnya UMB kepedalannya milik masyarakat setempat, tetapi bisa jadi milik warga luar Trenggalek.

Hasil sebaran LQ agak berbeda, jika LQ yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kecamatan Durenan yang potensi UMB menurut LQ jumlah usaha, jika dilihat menurut LQ tenaga kerja, potensi pada usaha berskala UMK. Artinya, penyerapan tenaga kerja di Durenan, usaha berskala UMK relatif lebih menonjol dibanding penyerapan tenaga kerja pada skala UMB. Kondisi itu juga terjadi untuk Kecamatan Pogalan.

LQ Hasil Listing SE2016 Menurut Kategori

Ada hal yang menarik lainnya yang bisa dilihat dari hasil analisis LQ hasil listing SE2016 jumlah usaha. Yaitu sebaran potensi suatu kategori/sektor di Kabupaten Trenggalek. Meskipun demikian, perlu kehati-hatian dalam membaca hasil LQ tersebut. Karena didasarkan dari jumlah usaha, maka wilayah yang mempunyai usaha terbanyak dalam suatu kategori/sektor, akan cenderung disimpulkan sebagai wilayah yang mempunyai potensi ekonomi pada kategori/sektor tersebut. Dengan kata lain, suatu wilayah yang mempunyai usaha di suatu sektor dengan jumlah sedikit tetapi mempunyai output yang besar, tidak akan begitu nampak pada analisis LQ. Sebaliknya wilayah dengan jumlah usaha yang besar, meskipun outputnya tidak begitu besar, akan dibaca oleh LQ sebagai usaha yang potensial.

Pengguna data juga harus hati-hati dalam membaca kategori/sektor yang disebut sebagai sektor potensi/unggulan. Beberapa kategori tidak berdiri sendiri, tetapi gabungan dari beberapa sektor, bahkan untuk analisis beberapa kategori digabungkan. Sebagai contoh, kategori B terdiri dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Ketika suatu wilayah dikatakan potensi pada kategori B, yang menonjol

bukan berarti kedua-duanya (Pertambangan dan Penggalian), tetapi bisa jadi yang menonjol pertambangannya saja atau penggaliannya saja.

Tabel 3.3
Potensi Kategori B, Kategori C dan Kategori D
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Kategori B		Kategori C		Kategori D	
	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Panggul		√				
[020] Munjungan	√	√			√	
[030] Watulimo			√	√		
[040] Kampak	√	√	√	√		
[050] Dongko						
[060] Pule						
[070] Karanganyar						
[071] Suruh		√				
[080] Gandusari			√	√		
[090] Durenan			√	√	√	
[100] Pogalan	√	√				
[110] Trenggalek					√	√
[120] Tugu	√	√			√	√
[130] Bendungan						

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = LQ > 1

Kategori B = Pertambangan dan Penggalian

Kategori C = Industri Pengolahan

Kategori D = Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara dingin

Gambaran LQ kategori B (pertambangan dan penggalian) terdapat pada kecamatan yang mempunyai basis pada kategori tersebut yang kebanyakan berada sebagian besar di wilayah pegunungan. Meski di Trenggalek kaya akan bahan tambang, namun yang lebih dominan adalah usaha penggaliannya. Melihat hasil penghitungan LQ,

Kecamatan Munjungan, Kampak, Pogalan dan Tugu dapat dikatakan sebagai wilayah sektor basis untuk kategori B.

Pada kategori C (Industri Pengolahan), terdapat empat kecamatan di wilayah Trenggalek yang mempunyai $LQ > 1$ atau mempunyai sektor basis pada sektor industri pengolahan. Kecamatan tersebut adalah Watulimo, Kampak, Gandusari dan Durenan. Ini menunjukkan sebagaimana ulasan sebelumnya bahwa industri pengolahan di kecamatan lainnya meski terdapat yang berskala UMB, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usaha di keempat kecamatan tadi meski berskala banyak yang berskala UMK.

Untuk kategori D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara dingin), terdapat dua kecamatan di wilayah Trenggalek yang mempunyai jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja dengan $LQ > 1$ atau mempunyai sektor basis pada sektor ini. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Trenggalek dan Tugu. Ini menunjukkan bahwa sektor basis untuk Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air panas dan Udara dingin terdapat di Kecamatan Trenggalek dan Tugu, meski terdapat pula usaha serupa di kecamatan lainnya.

Kategori E berhubungan erat dengan usaha pengelolaan air, limbah, daur ulang sampah dan aktivitas remediasi. Dari tabel 3.4 dapat diketahui kecamatan mana saja yang merupakan basis kegiatan pada kategori E. Terdapat lima kecamatan yaitu Kecamatan Trenggalek, Watulimo, Pule, Karanganyan dan Suruh yang penghitungan LQ usaha dan LQ tenaga kerja lebih dari satu. Dapat disimpulkan bahwa potensi kategori E terletak di Kecamatan Trenggalek, Watulimo, Pule, Karanganyan dan Suruh.

Tabel 3.4
Potensi Kategori E, Kategori F dan Kategori G
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Kategori E		Kategori F		Kategori G	
	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Panggul					√	√
[020] Munjungan					√	√
[030] Watulimo	√	√				
[040] Kampak						
[050] Dongko					√	√
[060] Pule	√	√	√	√	√	√
[070] Karang	√	√	√	√	√	√
[071] Suruh	√	√			√	√
[080] Gandusari						
[090] Durenan						
[100] Pogalan	√		√		√	√
[110] Trenggalek	√	√	√	√	√	
[120] Tugu				√	√	√
[130] Bendungan					√	√

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = LQ > 1

Kategori E = Pengelolaan air, limbah, daur ulang sampah dan aktivitas remediasi

Kategori F = Konstruksi

Kategori G = Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor

Jika dilihat berdasarkan LQ menurut jumlah usaha, Kecamatan Trenggalek, Pule, Karang, Gandusari dan Pogalan mempunyai sektor basis pada kategori F. Usaha yang dimaksud adalah usaha di bidang konstruksi. Terdapat 579 usaha konstruksi yang merupakan gabungan dari kelima kecamatan tadi atau lebih dari 72 persen dari total usaha konstruksi di Kabupaten Trenggalek. Dari dominasi kelima kecamatan tersebut, sangatlah wajar apabila merupakan basis kegiatan pada

kategori F. Sementara itu, kategori G yang meliputi usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan sebagai basis usaha pada kategori ini. Penghitungan LQ jumlah usaha kategori G menunjukkan adanya 10 kecamatan dengan $LQ > 1$. Kecamatan tersebut kecuali Kecamatan Watulimo, Kampak, Gandusari dan Durenan. Usaha kategori G terbanyak terdapat di Kecamatan Panggul dan Kecamatan Trenggalek dengan 4.435 usaha dan 4.431 usaha.

Tabel 3.5
Potensi Kategori H, Kategori I dan Kategori J
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Kategori H		Kategori I		Kategori J	
	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Panggul	√	√	√	√		√
[020] Munjungan	√	√	√		√	√
[030] Watulimo	√					
[040] Kampak	√					
[050] Dongko					√	√
[060] Pule						
[070] Karanganyar		√	√		√	√
[071] Suruh	√				√	√
[080] Gandusari						
[090] Durenan	√	√	√	√	√	√
[100] Pogalan			√	√		
[110] Trenggalek	√		√	√		√
[120] Tugu						√
[130] Bendungan	√	√		√	√	√

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = $LQ > 1$

Kategori H = Pengangkutan dan perdagangan

Kategori I = Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum

Kategori J = Informasi Dan Komunikasi

Transportasi darat merupakan bagian dari kategori H, dimana kategori H meliputi pengangkutan dan pergudangan. Transportasi darat dapat berupa angkutan barang dan penumpang roda empat, becak dan ojek. Usaha kategori H menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Tak ada kecamatan yang betul-betul dominan dalam kategori ini. Dari penghitungan LQ menurut jumlah usaha, terdapat 8 kecamatan yang bisa dikatakan basis kategori H dengan $LQ > 1$. Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Suruh, Durenan, Trenggalek dan Bendungan.

Kategori I termasuk didalamnya usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Usaha terbanyak pada kategori I terdapat di Kecamatan Trenggalek dengan 1.547 unit usaha. Tak mengherankan apabila Kecamatan Trenggalek menjadi salah satu basis dari kategori ini. Dari tabel 3.5 dapat kita ketahui bahwa selain Kecamatan Trenggalek, beberapa kecamatan juga menjadi basis usaha kategori I, antara lain Kecamatan Panggul, Durenan dan Pogalan. Layak dicermati mengapa kecamatan tersebut termasuk basis, diantaranya karena Panggul kaya akan obyek wisata dan kecamatan lainnya karena merupakan kecamatan yang dilalui jalan poros provinsi.

Usaha pada kategori J mencakup bidang komunikasi dan Informasi, termasuk diantaranya penyediaan pulsa selular. Meski pusat telekomunikasi umumnya di kota, tetapi karena penjualan pulsa merupakan bagian dari kategori J, maka penyebarannya tidak selalu terpusat di kota. Banyak sekali penjualan pulsa di wilayah kecamatan yang sifatnya usaha mikro perorangan. Tak mengherankan apabila

kecamatan di wilayah pegunungan seperti Munjungan dan Dongko dapat menjadi basis kategori J di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 3.6
Potensi Kategori K, Kategori L dan Kategori M
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Kategori K		Kategori L		Kategori M	
	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Panggul	√					
[020] Munjungan	√				√	
[030] Watulimo				√		
[040] Kampak						
[050] Dongko					√	
[060] Pule						
[070] Karanganyar	√		√	√	√	√
[071] Suruh		√			√	
[080] Gandusari	√					
[090] Durenan			√	√	√	√
[100] Pogalan						
[110] Trenggalek	√	√	√	√	√	√
[120] Tugu			√	√	√	√
[130] Bendungan						

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = LQ > 1

Kategori K = Aktivitas Keuangan Dan Asuransi

Kategori L = Real Estat

Kategori M = Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis

Aktivitas keuangan dan Asuransi yang menjadi bagian dari kategori K, serara umum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Diantara lima kecamatan yang menjadi basis usaha kategori K, Kecamatan Trenggalek mendominasi dari sisi jumlah usaha dengan 89 unit usaha atau lebih dari 26 persen dari total jumlah usaha kategori

K di Kabupaten Trenggalek. Kecamatan lain yang menjadi basis adalah Panggul, Munjungan, Karanganyan dan Gandusari.

Basis usaha kategori L (real estat) dan kategori M (aktifitas profesional, ilmiah dan teknis) dengan $LQ > 1$, terdapat di Kecamatan Karanganyan, Durenan, Trenggalek dan Tugu, bersamaan banyaknya usaha kategori L dan M di keempat kecamatan tersebut. Selain itu Kecamatan Munjungan dan Pule juga menjadi basis usaha kategori L.

Tabel 3.7
Potensi Kategori N, Kategori P dan Kategori Q
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Kategori N		Kategori P		Kategori Q	
	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Panggul	√	√		√		
[020] Munjungan	√	√	√	√	√	√
[030] Watulimo						
[040] Kampak					√	
[050] Dongko		√	√	√		√
[060] Pule			√			
[070] Karanganyan	√		√		√	
[071] Suruh	√	√	√	√	√	√
[080] Gandusari	√	√			√	√
[090] Durenan	√	√		√		
[100] Pogalan	√		√	√	√	
[110] Trenggalek	√		√		√	√
[120] Tugu			√	√	√	
[130] Bendungan			√	√	√	

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = $LQ > 1$

Kategori N= Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

Kategori P = Pendidikan

Kategori Q = Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial

Usaha kategori P (Pendidikan) dan Q (aktifitas kesehatan manusia dan aktifitas sosial) di Trenggalek tersebar di seluruh kecamatan dan tidak ada dominasi mutlak oleh kecamatan tertentu. Menurut LQ jumlah usaha, sektor basis pada kategori P terdapat di 9 kecamatan kecuali Kecamatan Panggul, Watulimo, Kampak, Gandusari dan Durenan. Sedangkan untuk kategori Q, basis usahanya terdapat di Kecamatan Munjungan, Kampak, Karang, Suruh, Gandusari, Pogalan, Trenggalek, Tugu dan Bendungan.

Tabel 3.7
Potensi Kategori R dan Kategori S
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Kategori R		Kategori S	
	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[010] Panggul	√	√	√	√
[020] Munjungan	√	√		
[030] Watulimo	√	√		
[040] Kampak		√		
[050] Dongko	√	√	√	√
[060] Pule	√	√		
[070] Karang	√		√	√
[071] Suruh			√	√
[080] Gandusari				
[090] Durenan			√	√
[100] Pogalan			√	√
[110] Trenggalek	√		√	√
[120] Tugu			√	√
[130] Bendungan	√	√		

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = $LQ > 1$

Kategori R = Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi

Kategori S = Aktivitas Jasa Lainnya

Usaha kategori R dan S di Trenggalek juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana kategori P dan Q dan tak ada dominasi mutlak oleh kecamatan tertentu. Berdasarkan LQ jumlah usaha, kecamatan yang berpotensi sebagai basis usaha pada kategori R adalah Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Dongko, Pule, Karang, Trenggalek dan Bendungan. Sedangkan basis usaha kategori S terdapat di Kecamatan Panggul, Dongko, Karang, Suruh, Durenan, Pogalan, Trenggalek dan Tugu.

Tipologi Klassen Menurut Data Output Wilayah

Untuk menentukan suatu sektor unggulan dan menguatkan hasil analisis LQ sebelumnya, bisa digunakan analisis Tipologi Klassen menggunakan data output wilayah (PDRB). Jika analisis LQ menekankan suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan bergantung banyaknya jumlah usaha, pada analisis Tipologi Klassen bergantung kontribusi output dan pertumbuhannya.

Pada analisis Klassen, kecamatan yang terletak pada kuadran I adalah menunjukkan sektor tersebut unggulan, sedangkan yang terletak pada kuadran II dan III menunjukkan sektor tersebut sektor potensial. Kuadran IV menunjukkan sektor yang dianalisis tidak menunjukkan keunggulan dan tidak potensial. Bisa diartikan pada kuadran IV, sektor yang dimaksud sulit untuk dikembangkan atau memang belum pernah digali. Data yang digunakan pada analisis Tipologi Klassen, persentase kontribusi suatu sektor yang dianalisis dan pertumbuhannya. Sebagai pembanding dipakai kontribusi dan pertumbuhan sektor/kategori yang sama level kabupaten.

Tabel 3.8
 Tipologi Klassen Perekonomian Trenggalek
 Menurut Kategori Non Pertanian, 2016

Kategori / Lapangan Usaha	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran III	Kuadran IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan Penggalian		√		
C. Industri Pengolahan			√	
D. Pengadaan Listrik dan Gas			√	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang				√
F. Konstruksi			√	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			√	
H. Transportasi dan Pergudangan			√	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				√
J. Informasi dan Komunikasi	√			
K. Jasa Keuangan dan Asuransi			√	
L. Real Estat				
M,N. Jasa Perusahaan			√	
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	√			
P. Jasa Pendidikan	√			
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	√			
R, S, U. Jasa lainnya	√			

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Melalui analisis Tipologi Klassen, diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu:

- Kuadran I : sektor unggulan dan tumbuh pesat,
- Kuadran II : sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan,
- Kuadran III : sektor potensial yang berkembang cepat, dan
- Kuadran IV: sektor yang tidak potensial.

Terdapat enam kategori non pertanian yang berada di kuadran I pada Tipologi Klassen yaitu kategori J (Informasi dan Komunikasi), Kategori L (Real Estat), Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib), kategori P (Jasa Pendidikan), Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) dan Kategori R, S, U (Jasa Lainnya). Keenam kategori tersebut mempunyai kontribusi yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan pada kategori yang sama Jawa Timur.

Kuadran II hanya diisi oleh kategori B (Pertambangan dan Penggalian). Kategori B Trenggalek mempunyai kontribusi yang lebih kecil, namun pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan Jawa Timur. Sementara itu, sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan berada pada kuadran III. Pada kuadran ini, terdapat 7 kategori lapangan usaha, yaitu kategori C (Industri Pengolahan), kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas), kategori F (Konstruksi), kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), kategori H (Transportasi dan Pergudangan), kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) dan kategori M, N (Jasa Perusahaan). Adapun sektor yang tidak potensial pada kuadran IV adalah kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Analisis Overlay Base Economic Approach

Selain menggunakan analisis LQ dan Tipologi Klassen, untuk menentukan sektor unggulan bisa dilakukan dengan analisis *overlay base economic approach*. Analisis ini merupakan skoring dari kombinasi analisis LQ, shift-share, model rasio pertumbuhan dan Tipologi kelas.

Dalam analisis *overlay base economic approach*, dari setiap analisis di dalamnya dilakukan skoring untuk sektor-sektor unggulan. Kategori/sektor yang mempunyai skor tertinggi merupakan sektor unggulan menurut *overlay base economic approach*. Dari hasil pengolahan menggunakan *overlay base economic approach* diperoleh informasi sektor unggulan menurut kecamatan.

Tabel 3.9
Sektor Unggulan Berdasarkan Analisis *Overlay Base Economic Approach*
Kabupaten Trenggalek Menurut Kategori Non Pertanian, 2016

Kategori Lapangan Usaha	Unggulan	Non Unggulan
(1)	(2)	(3)
B. Pertambangan dan Penggalian		√
C. Industri Pengolahan		√
D. Pengadaan Listrik dan Gas		√
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		√
F. Konstruksi		√
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		√
H. Transportasi dan Pergudangan		√
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		√
J. Informasi dan Komunikasi	√	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi		√
L. Real Estat	√	
M,N. Jasa Perusahaan		√
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		√
P. Jasa Pendidikan	√	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	√	
R, S, U. Jasa lainnya		√

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan analisis *base economic approach*, Kabupaten Trenggalek mempunyai sektor unggulan/potensial pada empat kategori lapangan usaha, yaitu kategori J, L, P dan Q. Sedangkan kategori lainnya bukan merupakan sektor unggulan.

Banyaknya sektor unggulan dan potensial di Trenggalek, terutama kategori P (Pendidikan) dan kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) menyebabkan Trenggalek menjadi salah satu tujuan mengadu nasib tidak hanya penduduk Trenggalek tetapi juga penduduk di luar Trenggalek. Usaha pada lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan cukup menjanjikan dan menggiatkan dibandingkan dengan usaha di bidang lainnya.

C. Potensi Wilayah dalam Visi dan Misi Pemerintah Trenggalek

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Visi tersebut adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa"

Penjelasan Visi:

"MAJU" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“ADIL” berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

“SEJAHTERA” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

“BERKEPRIBADIAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat trenggalek; dan berakhlak mulia.

Visi tersebut dilaksanakan dengan 7 (tujuh) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
5. Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

6. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
7. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tabel 3.10
Jumlah Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha dan Skala Usaha Non
Pertanian di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kategori / Lapangan Usaha	Mikro	Kecil	Mene- ngah	Besar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan Penggalian	648	2	2	0	652
C. Industri Pengolahan	31.178	831	131	4	32.144
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26	3	2	1	32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	253	1	4	0	258
F. Konstruksi	187	601	14	1	803
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38.232	3.217	182	7	41.638
H. Transportasi dan Pergudangan	2.383	59	21	0	2.463
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	7.612	285	3	0	7.900
J. Informasi dan Komunikasi	1.655	62	25	1	1.743
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	143	114	76	4	337
L. Real Estat	160	1	0	0	161
M,N. Jasa Perusahaan	1.204	40	19	0	1.263
P. Jasa Pendidikan	1.734	146	6	0	1.886
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	617	35	7	1	660
R, S, U. Jasa lainnya	3.770	47	9	0	3.826
Jumlah	89.802	5.444	501	19	95.766

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Hasil listing Sensus Ekonomi (SE) 2016 menunjukkan bahwa visi dan misi pemerintah Trenggalek terhadap pengoptimalan potensi daerah. Perekonomian Trenggalek non pertanian hasil listing SE2016 sangat didominasi oleh UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Tercatat UMKM di Trenggalek sebanyak 99,98 persen terdiri dari usaha mikro (93,77 persen), usaha kecil (5,68 persen) dan usaha menengah (0,52 persen). Usaha berskala besar yang mendukung perekonomian Trenggalek hanya sebesar 0,02 persen.

Dari jumlah usaha UMKM dalam SE2016 diketahui bahwa sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; yang berskala UMKM cukup besar atau sekitar 33,56 persen dan 43,46 persen dari seluruh usaha non pertanian di Trenggalek. Dengan demikian, industri pengolahan dan perdagangan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup besar, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Trenggalek.

Untuk mengurangi disparitas wilayah, Pemerintah Trenggalek perlu menitik beratkan industri UMKM yang berbasis agrobisnis yang mendukung sektor pertanian. Diharapkan hasil pertanian Trenggalek tidak hanya dijual dalam bentuk hasil pertanian langsung, tetapi juga menjadi bahan olahan industri yang mempunyai nilai tambah lebih.

<https://trenggalekkab.bps.go.id>

<http://trenggalekkab.bps.go.id>

Jasa Pendidikan Sebagai Sektor Unggulan

Dalam uraian bab sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan analisis *base economic approach*, Kabupaten Trenggalek mempunyai sektor unggulan/potensial pada empat kategori lapangan usaha, yaitu kategori J (informasi dan komunikasi), kategori L (real estat), kategori P (jasa pendidikan) dan kategori Q (jasa kesehatan dan kegiatan sosial). Bab IV mengulas salah satu sektor unggulan hasil listing SE2016, yaitu Jasa Pendidikan. Alasan dipilihnya jasa pendidikan antara lain adalah diantara empat sektor unggulan, jasa pendidikan merupakan sektor yang mempunyai jumlah usaha terbanyak (1.886 usaha) dan mampu menyerap tenaga kerja terbesar (16.208 orang).

A. Potensi Jasa Pendidikan

Potensi jasa pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek sangatlah beragam. Letak geografis dan kepadatan penduduk antar kecamatan menjadi salah satu sebab keragaman ini. Hasil SE2016 menunjukkan bahwa dominasi jasa pendidikan terdapat di Kecamatan Trenggalek dengan jumlah usaha/perusahaan mencapai 217 unit usaha serta menyerap tenaga kerja sebanyak 2.171 orang. Namun dominasi ini bukanlah dominasi mutlak mengingat usaha/perusahaan di kecamatan Trenggalek hanya sebesar 11,5 persen dari keseluruhan usaha/perusahaan jasa pendidikan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 4.1
Sebaran Kategori P (Jasa Pendidikan) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	Banyaknya Usaha / Perusahaan	Banyaknya Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
[010] Panggul	155	1.339
[020] Munjungan	141	1.117
[030] Watulimo	156	1.332
[040] Kampak	86	777
[050] Dongko	128	1.100
[060] Pule	111	682
[070] Karangan	141	1.106
[071] Suruh	84	564
[080] Gandusari	121	1.039
[090] Durenan	169	1.581
[100] Pogalan	159	1.552
[110] Trenggalek	217	2.171
[120] Tugu	161	1.374
[130] Bendungan	57	474
Kab. Trenggalek	1.886	16.206

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Capaian ekonomi Trenggalek menempatkan Trenggalek termasuk salah satu dari kabupaten/kota di Jawa Timur yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir di atas 5 persen. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku mengalami perkembangan yang cukup pesat pada 5 tahun terakhir dari sekitar Rp. 9,96 milyar pada tahun 2012 menjadi sekitar Rp. 14,96 milyar pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Trenggalek mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5,51 persen pertahunnya.

Kategori jasa pendidikan merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Trenggalek. Meskipun nominal PDRB kategori jasa pendidikan tidaklah besar, namun pertumbuhannya yang diatas pertumbuhan Trenggalek membuat kategori jasa pendidikan layak disebut sebagai salah satu penopang perekonomian. Tahun 2012, PDRB adhb kategori jasa pendidikan sebesar Rp. 446,15 juta (4,48 persen dari total PDRB adhb Trenggalek) dengan pertumbuhan 8,94 persen, jauh melampaui pertumbuhan Trenggalek yang sebesar 6,21 persen. Sedangkan pada tahun 2016, meskipun PDRB adhb kategori jasa pendidikan hanya sebesar Rp. 673,72 juta (4,52 persen dari total PDRB adhb Trenggalek) namun pertumbuhannya yang sekitar 6,02 persen, masih jauh diatas pertumbuhan Trenggalek yang sebesar 5,00 persen.

Tabel 4.2
Capaian Kategori P (Jasa Pendidikan) Kabupaten Trenggalek,
2012-2016

Tahun	PDRB adhb (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB adhb Kategori P (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Kategori P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	9.969.195,2	6,21	446,154.5	8.94
2013	11.007.902,7	6,00	514,121.4	8.95
2014	12.297.003,1	5,28	569,911.9	6.24
2015	13.634.752,8	5,03	624,656.5	6.02
2016	14.915.998,5	5,00	673,719.0	6.02

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

LQ Hasil Listing SE2016 Kategori Jasa Pendidikan

Analisis data SE2016 kategori jasa pendidikan diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang untuk membantu upaya menggali potensi pendidikan di tingkat kecamatan. Dengan mengetahui potensi pendidikan suatu kecamatan, kebijakan dibidang pendidikan akan

terfokus dan terarah. Pemerintah daerah akan mudah menyusun strategi dalam menggali pendidikan ekonomi wilayahnya.

Terdapat hal menarik yang bisa diperoleh dari hasil analisis LQ hasil listing SE2016 kategori jasa pendidikan, yaitu sebaran potensi kategori jasa pendidikan menurut kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Didasarkan dari jumlah usaha, maka wilayah yang mempunyai usaha terbanyak dalam kategori jasa pendidikan, akan cenderung disimpulkan sebagai wilayah yang mempunyai potensi pada kategori tersebut.

Tabel 4.3
Potensi Kategori P (Jasa Pendidikan)
Menurut LQ Jumlah Usaha dan LQ Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Trenggalek, 2016

Kecamatan	LQ Jumlah Usaha	LQ Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
[010] Panggul		√
[020] Munjungan	√	√
[030] Watulimo		
[040] Kampak		
[050] Dongko	√	√
[060] Pule	√	
[070] Karanganyar	√	
[071] Suruh	√	√
[080] Gandusari		
[090] Durenan		√
[100] Pogalan	√	√
[110] Trenggalek	√	
[120] Tugu	√	√
[130] Bendungan	√	√
Kab. Trenggalek	√	√

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek (SE2016 Hasil Listing)

Keterangan: √ = LQ > 1

Usaha kategori P (Pendidikan) dan Q (aktifitas kesehatan manusia dan aktifitas sosial) di Trenggalek tersebar di seluruh kecamatan dan tidak ada dominasi mutlak oleh kecamatan tertentu. Menurut LQ jumlah usaha, sektor basis pada kategori P terdapat di 9 kecamatan kecuali Kecamatan Panggul, Watulimo, Kampak, Gandusari dan Durenan. Sedangkan untuk kategori Q, basis usahanya terdapat di Kecamatan Munjungan, Kampak, Karang, Suruh, Gandusari, Pogalan, Trenggalek, Tugu dan Bendungan. Sementara itu menurut LQ jumlah tenaga kerja, sektor basis pada kategori P terdapat di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Panggul, Munjungan, Dongko, Suruh, Durenan, Pogalan, Tugu dan Bendungan. Kecamatan yang merupakan basis tenaga kerja namun bukan merupakan basis usaha, terdapat indikasi tenaga kerja pada kategori jasa pendidikan tersebut banyak yang bekerja di luar kecamatannya.

B. Tantangan Jasa Pendidikan

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Menyelenggarakan pendidikan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Trenggalek menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam bidang pendidikan.

Upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengantarkan penduduknya mengenyam pendidikan diwujudkan dalam program pendidikan usia dini, program pendidikan dasar, program pendidikan non formal, program pendidikan luar biasa, peningkatan mutu

pendidikan dan tenaga pendidik hingga program pendidikan tinggi. Pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama, setiap individu dan masyarakat. Pendidikan keluarga menjadi penting dalam membentuk karakter individu yang akan mengarah pada pembentukan karakter masyarakat dan akhirnya menjadi karakter bangsa.

Pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengatasi permasalahan dalam bidang pendidikan khususnya untuk wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Perpustakaan keluarga, dan kelompok belajar yang terbentuk dalam suatu masyarakat, baik di komunitas tertentu ataupun di sekolah-sekolah dapat membantu memberantas buta aksara. Kegiatan sosialisasi gemar membaca bukan saja ditujukan agar penduduk mampu membaca dan menulis, akan tetapi lebih diarahkan pada pembentukan pola pikir bahwa di jaman informasi dan teknologi seperti saat ini, dengan membaca kita dapat memperoleh berbagai informasi penting sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejauh mana pembangunan pendidikan telah berjalan dan membuahkan hasil maka diperlukan seperangkat data dan indikator yang mampu menggambarkan kondisi dan perkembangannya. Melalui data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek data pendidikan dapat disajikan untuk memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia kategori P (Jasa Pendidikan) dan Infrastruktur pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Keberhasilan pembangunan pendidikan tentu tidak lepas dari pembangunan Sumber Daya Manusia dilingkungan pendidikan yang terdiri dari murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan

tenaga pengelola administrasi pendidikan. Meningkatnya kemampuan murid dalam menguasai berbagai mata pelajaran, meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagai unit terdepan pelaksana pendidikan, akan meningkatkan proses kemajuan sosial, ekonomi dan budaya suatu bangsa.

Tabel 4.4
 Fasilitas Pendidikan Dirinci menurut Jenjang Pendidikan
 Kabupaten Trenggalek
 2015 - 2016

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Ruang Belajar	Murid	Guru	Murid Per Sekolah	Murid Per Ruang Belajar	Guru Per Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SD	441	2.876	47.035	4.249	107	16	10
SLTP	81	873	24.216	1.871	298	28	23
SLTA	50	691	20.390	1.760	5.436	392	472

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai saat ini mendorong peningkatan partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia sekolah. Bersekolah bukan saja merupakan kebutuhan agar dapat membaca dan menulis, akan tetapi lebih sebagai sarana untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, bersosialisasi, dan memperoleh berbagai keterampilan. Program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan agar penduduk dapat mengenyam pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) mampu mendorong peningkatan APS 13-15 tahun dan mengurangi jumlah penduduk di kelompok usia ini yang belum/tidak berada di bangku pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan yang menyeluruh dan mudah diakses utamanya bagi penduduk di kelompok usia yang masih belia diharapkan dapat

mengantarkan generasi mendatang menjadi generasi yang maju dan mampu memakmurkan bangsa.

Tabel 4.5
 Fasilitas Pendidikan Dirinci menurut Jenjang Pendidikan
 Kabupaten Trenggalek
 2015 - 2016

	Usia 7-12 Th (SD)		Usia 13-15 Th (SMP)		Usia 16-18 Th (SMA)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS	99,71	100,00	96,08	92,24	62,33	70,44
APK	112,30	107,85	84,83	77,25	73,68	84,35
APM	99,71	100,00	78,70	73,70	49,85	65,87

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

Pembangunan berlangsung sangat cepat membawa berbagai perubahan di segala bidang. Pendidikan harus juga bisa mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut pada saat yang tepat. Program pembangunan dan pelayanan pendidikan akan terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan apabila diterapkan strategi yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan pemetaan sasaran;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi maupun ke tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Melaksanakan sosialisasi secara tepat;
4. Meningkatkan pengendalian atau monitoring pelaksanaan kegiatan;m
5. Memanfaatkan teknologi untuk menuntaskan pelaksanaan wajib belajar.

Banyaknya permasalahan kompleks dalam bidang pendidikan masih menjadi kendala untuk dapat mencapai APS 100 persen di kelompok usia 13-15 tahun. Adanya faktor sosial budaya masyarakat yang membatasi anak-anaknya untuk bersekolah di jenjang lebih tinggi salah satu penyebab belum tercapainya APS 100 persen di kelompok usia ini. Alasan ekonomi, kasus kawin muda, harus membantu orang tua mencari nafkah, dan masih adanya pemahaman bahwa pendidikan bukan prioritas utama dalam hidupnya, merupakan permasalahan-permasalahan yang kerap di temui di Kabupaten Trenggalek.

C. Program Pendidikan Pemerintah Daerah

Mencermati visi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 beserta penjelasannya, dikaitkan dengan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, nampaklah bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki komitmen untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang maju berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

Pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan, kebijakan bidang pendidikan yang relevan, peningkatan kinerja birokrasi pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Kabupaten Trenggalek untuk lebih berdaya saing. Seperti

diketahui kemampuan bersaing bagi Kabupaten Trenggalek pada tataran lokal, nasional, regional maupun internasional, hanya dapat ditingkatkan melalui dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keniscayaan.

Tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan serta meningkatkan pelestarian budaya lokal, pembangunan karakter dan revolusi mental. Dari tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan luar biasa/ anak berkebutuhan khusus, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) serta pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Meningkatnya kualitas dan mutu manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator resmi yang digunakan sebagai penentu keberhasilan pembangunan daerah. Pada hakikatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana tetapi juga peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 3 (tiga)

komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Disamping itu angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan program POSKO WAJIB BELAJAR 12 TAHUN. Dari kegiatan posko ini diperoleh hasil yang signifikan :

1. Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs dari target penurunan sebesar 0,40% terealisasi sebesar 0,20% atau capaiannya sebesar 200% dari target.
2. Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMA/SMK/MA dari target penurunan sebesar 0,60% terealisasi sebesar 0,24% atau capaiannya sebesar 250% dari target.
3. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari target AM sebesar 82% tercapai 86,18% atau capaiannya sebesar 105,10%.

Capaian diatas diperkirakan akan turut berkontribusi kepada peningkatan angka harapan lama bersekolah.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung rata-rata lama sekolah adalah

penduduk berusia 25 tahun keatas. Untuk mengetahui peningkatan rata-rata lama sekolah memerlukan waktu yang relatif lama karena menyangkut penduduk usia 25 tahun keatas. Sedangkan yang dapat diintervensi secara maksimal adalah penduduk yang berusia sampai dengan 18 tahun terutama yang berada di lingkungan sekolah. Dengan dilaksanakannya POSKO WAJIB BELAJAR 12 TAHUN telah menurunkan angka putus sekolah baik di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta meningkatkan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, maka pada tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah dapat diprediksi meningkat.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesempatan penduduk Kabupaten Trenggalek usia 15 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan lebih lama (dengan jenjang yang lebih tinggi tentunya) semakin bertambah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sasaran pembangunan untuk wajib belajar pada tingkat dasar telah tercapai. Kemudahan mengakses pendidikan dewasa ini masih terpusat pada beberapa kecamatan. Ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya mendorong peningkatan kualitas pembangunan dalam bidang pendidikan.

Lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi dengan mudah ditemui di wilayah Trenggalek. Belum lagi dengan jumlah penduduknya yang besar, merupakan sumber daya manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan, dan tersedianya infrastruktur lainnya menunjang peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Trenggalek.

Dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2016, urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar lebih dari Rp. 31 milyar dengan realisasi optimal sekitar Rp.28,4 milyar atau sekitar 90,08 persen. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan program-program yang telah didukung dengan indikator kinerja program sebagaimana berikut:

Tabel 4.6
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2016		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			
	a Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	78,26	84,10	107,46
2	Program Pendidikan Dasar			
	a Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,18	99,72
	b Angka Harapan Lama Bersekolah	12,10	12,08	99,83
	c Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs)	100	97,00	97,00
	d Angka Partisipasi Sekolah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15)	100	101	101
	e Rasio guru terhadap murid SD/MI Paket A	1:12	1:12	100
	f Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Paket B	1:12	1:13	92,31
	g Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi bangunan baik	85,38	72,21	84,57
	h Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi bangunan baik	90,70	89,43	98,60
	i Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,40	0,20	200
	j Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100
	k Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100
	l Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	98,11	98,11

Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2016		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
3	Program Pendidikan Menengah			
	a Angka partisipasi SMA/SMK/MA/Paket C	65	79,69	122,61
	b Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA/Paket C	1:11	1:12	109,09
	c Persentase Ruang Kelas SMA kondisi bangunan baik	100	95,05	95,05
	d Persentase Ruang Kelas SMK kondisi bangunan baik	94,17	93,52	99,31
	e Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,60	0,24	250
	f Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100
	g Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	82	86,18	105,10
4	Program Pendidikan Non Formal dan Informal			
	a Persentase Penduduk Buta Aksara > 15 Th	0,15	0,14	93,33
5	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
	a Persentase Ruang Kelas SLB kondisi bangunan baik	78,57	100,00	127,28
	b Jumlah Sekolah Inklusi	18	17	94,44
	c Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapat layanan pendidikan	450	451	100,22
6	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			
	a Persentase Guru bersertifikat Pendidik	85,71	68,52	79,94
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
	a Persentase Berfungsinya Informasi Manajemen Pendidikan	100	99	99

Sumber : LKPJ Kabupaten Trenggalek TA 2016

Permasalahan :

- 1) Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi bangunan baik ditargetkan sebesar 85,38% tercapai 72,21% hal ini disebabkan anggaran DAK yang diprediksi sebesar 15 milyar tetapi alokasi DAK tahun 2016 hanya sebesar 4,5 milyar. Disamping itu disebabkan pula adanya 5 SD terkena bencana alam (SDN 1

Bendoroto Munjungan, SDN-SMP SATAP 2 Suruh, SDN 2 Kertosono Pule, SDN 7 Jombok Pule, SDN1 Sobo Munjungan).

- 2) Pada tahun anggaran 2016 kegiatan rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK-2014) berupa pengadaan peralatan laboratorium komputer tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya petunjuk teknis dari Kemendikbud.
- 3) Persentase Guru bersertifikat Pendidik dari target 85,71% tercapai 68,52% hal ini disebabkan adanya pembatasan kuota calon guru bersertifikasi pada tahun berjalan, usulan tahun 2016 sebesar 184 guru kuota dari pemerintah pusat sebesar 149 guru.
- 4) Seleksi siswa berprestasi jenjang SMP dianggarkan untuk tingkat Kabupaten dan Provinsi, namun karena Provinsi tidak mengadakan di tahun 2016 maka anggaran hanya direalisasikan untuk tingkat Kabupaten.

Solusi :

- 1) Pengusulan kembali pada Tahun 2017 melalui DAK dan APBD.
- 2) Dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK.
- 3) Pengusulan tambahan kuota guru bersertifikasi.
- 4) Terkait seleksi siswa berprestasi, akan tetap dianggarkan dengan asumsi adanya kompetisi tingkat yang lebih tinggi, mengingat

besaran anggaran yang perlu dicadangkan tidak terlalu signifikan.

<https://trenggalekkab.bps.go.id>
<http://trenggalekkab.bps.go.id>



DATA
MENCERDASKAN
BANGSA



0355 - 791432
bps3503@bps.go.id



Jl. Beigjen Soetran
Trenggalek